

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

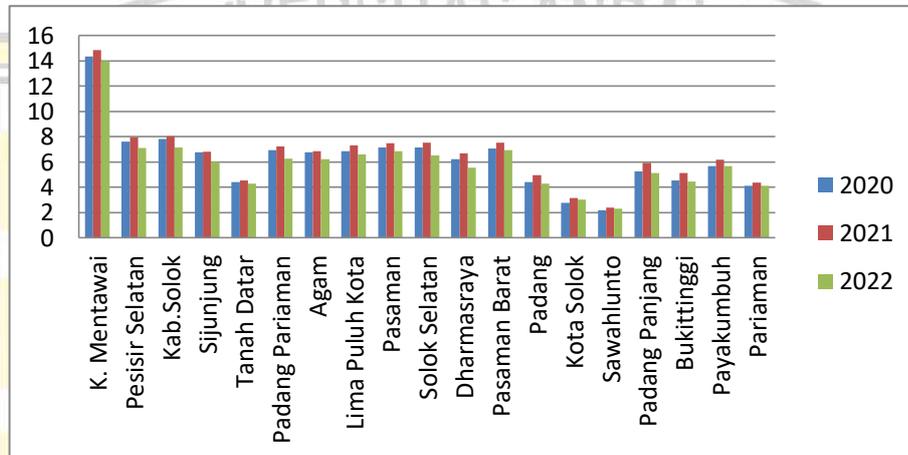
Tingkat kemiskinan menjadi ukuran indikator ketertinggalan suatu daerah berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat. Kemiskinan suatu keadaan yang sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam hal ekonomi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. *Basic Needs Approach* adalah metode pendekatan yang dilakukan BPS untuk menetapkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2023).

Pada tahun 2016 sampai 2020, Provinsi Sumatera Barat terjadi pengurangan masyarakat miskin, namun kembali naik pada tahun 2021. Tahun 2016 kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mencapai 371,55 ribu jiwa (7,14%), kemudian mengalami penurunan menjadi 364,51 ribu jiwa (6,57%) pada tahun 2017. Di tahun 2018 terus menurun menjadi 357,13 ribu jiwa (6,55%), dengan penurunan yang berlanjut tahun 2019 menjadi 348,22 (6,29%). Dan tahun 2020 yaitu 344,23 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan yang mencolok menjadi 370,67 ribu jiwa (6,63%) dari total penduduk Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2021).

Kabupaten Solok Selatan salah satu dari 62 kabupaten tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019. Lepasnya Kabupaten Solok Selatan dari daerah tertinggal bukan berarti menyelesaikan semua permasalahan terkait masalah yaitu tingginya tingkat kemiskinan. Grafik 1.1 menunjukkan Posisi kemiskinan kabupaten Solok Selatan di Sumatera Barat mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan mengalami kenaikan sebesar 7,15% di tahun 2020, untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang tinggi 7,52% dan untuk tahun 2022 mengalami penurunan 6,51% tapi terbilang tinggi dari provinsi Sumatera Barat yaitu 5,92% (BPS, 2023).

Pada tahun 2021 kemiskinan di kabupaten Solok Selatan masuk 4 besar di Provinsi Sumatera Barat terlihat di Grafik 1.1 dibawah ini, mencapai 7,52% dari jumlah penduduk dengan pendapatan masih di bawah garis kemiskinan sebesar RP. 438.442 per kapita/bulan (BPS Kabupaten Solok Selatan, 2023).

Grafik 1.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020-2022(diolah 2023)

Ada berbagai faktor penyebab terjadi kemiskinan salah satunya pengangguran dan PDRB. Dalam konteks ini, pengangguran menjadi unsur yang berperan signifikan pengaruh terhadap kemiskinan. Dalam Teori John Maynard Keynes (1936) pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan melalui mekanisme yang melibatkan kurangnya belanja konsumen. Dalam situasi di mana banyak orang menganggur, daya beli masyarakat menurun karena pendapatan rumah tangga berkurang. Hal ini dapat mengarah pada penurunan belanja konsumen, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan barang dan jasa.

Penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Di kabupaten solok selatan banyak masyarakat berkerja informal seperti menambang emas untuk dapat memenuhi kebutuhan, Menurut penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), aktivitas penambangan emas ilegal di Solok Selatan setidaknya terdapat di empat kecamatan, yakni Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, dan Sangir

Batanghari. Aktivitas tambang mengancam Hutan Lindung Batanghari dan meningkatkan sedimentasi di Sungai Batanghari serta anak-anak dari sungai. Pada Maret 2013, anggota DPR RI Azwir Dainy Tara dan anggota DPD RI Afrizal menyebut Ketua DPRD Solok Selatan Khairunas (kini Bupati Solok Selatan) terlibat di dalam praktik tambang ilegal di Solok Selatan. Khairunnas mengatakan tak bisa melarang rakyat menambang karena mereka menggantungkan hidup di sana. Solusi yang bisa ditempuh adalah dengan melegalkan yang ilegal (pembuperta Solok Selatan, 2021).

Salah satu sisi yang menarik untuk mengkaji kemiskinan pada Kabupaten Solok Selatan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat adalah aspek keberagaman ekosistem dan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Serta kawasan yang dijuluki sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang, banyak ditemukan rumah-rumah gadang berusia ratusan tahun lamanya yang masih ditinggali oleh penghuninya. Rumah Gadang 21 merupakan rumah gadang dengan 21 ruang. Selain itu ada Objek wisata lainnya seperti Danau Bontak, Ngalau Lubuk Malako, beberapa air terjun, dan sejumlah bangunan peninggalan sejarah lain seperti masjid, istana, dan monument (Pembuperta,2021).

Keragaman Ekosistem Kabupaten Solok Selatan sangat kaya juga unik, termasuk pegunungan, hutan, serta lahan pertanian yang subur. Kondisi ini dapat memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam upaya mengurangi pengangguran serta tingkat kemiskinan. Misalnya, sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi modal untuk pengembangan sektor pariwisata atau pertanian. Pada potensi pariwisata yang terkait dengan keberagaman ekosistem juga dapat menjadi faktor penarik untuk investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan pariwisata harus seimbang dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengurangan kemiskinan (Gusriza, 2022).

Yacob (2012) berpendapat bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat penting untuk diturunkan. Teorinya menjelaskan bahwa apabila masyarakat mempunyai penghasilan dan pekerjaan, maka dikatakan tidak menganggur. Dari penghasilan tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan, tidak akan terjadi peningkatan kemiskinan. Oleh karena

itu, ketika tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan juga akan rendah, atau sebaliknya.

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran di kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	Pengangguran (Orang/Jiwa)
2017	4345
2018	4345
2019	4168
2020	5084
2021	4335
2022	3 760

(sumber : BPS Provinsi Sumbar, 2023)

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah pengangguran dari tahun 2017 hingga 2022 terjadi fluktuasi. pada tahun 2017, di mana jumlah pengangguran menjadi 4.345 orang/jiwa, dan berlanjut hingga tahun 2019. Selanjutnya Pada tahun 2020, terjadi lonjakan yang signifikan kembali dalam jumlah pengangguran, mencapai 5.084 orang/jiwa. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup besar, di mana jumlah pengangguran kembali turun menjadi 4.335 orang/jiwa. Menurun ini berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah pengangguran mencapai titik terendah dalam periode tersebut, yaitu 3.760 orang/jiwa. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa ada fluktuasi dalam jumlah pengangguran tahun ke tahun, beberapa tahun terjadi peningkatan dan beberapa tahun mengalami penurunan. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan PDRB sering kali diikuti oleh pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Ini termasuk infrastruktur transportasi, air bersih, sanitasi, dan lainnya. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang ekonomi baru dan membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses pekerjaan, layanan, dan pasar, hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, PDRB yang tinggi akan menghasilkan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi, dimana orang miskin mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan meskipun PDRB tinggi bisa meningkatkan pendapatan secara umum, tetapi

beberapa orang mungkin tetap miskin karena tidak semua orang mendapat bagian yang sama dari peningkatan tersebut (Solow, R. M. 1956).

Lowing et al. (2021) menyatakan bahwa salah satu parameter yang mencerminkan keberhasilan pembangunan dan menjadi persyaratan untuk menurunkan kemiskinan yaitu PDRB. Daerah dianggap berhasil jika pertumbuhan ekonominya mampu merata di segala tingkatan masyarakat, termasuk kelompok penduduk yang kurang mampu secara ekonomi. PDRB berperan sebagai penunjuk kapabilitas daerah untuk mengendalikan SDM. Karena itu, potensi sumber daya alam dan faktor produksi lokal menjadi penentu jumlah PDRB yang dihasilkan oleh setiap wilayah. Keterbatasan faktor produksi menyebabkan variasi PDRB antar daerah. Peningkatan PDRB suatu daerah juga menunjukkan potensi daerah tersebut semakin besar.

Tabel 1.2 Jumlah PDRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
2017	3.612.641,03
2018	3.793.185,19
2019	3.977.408,80
2020	3.928.031,72
2021	4.058.514,72
2022	4.221.146,88

(sumber : BPS Provinsi Sumbar, 2023)

Tabel 1.2 menunjukkan data jumlah PDRB untuk Kabupaten Solok Selatan dalam satuan juta rupiah selama periode tahun 2017 hingga 2022. PDRB ialah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah geografis tertentu pada satu periode waktu, biasanya diukur dalam 1 tahun. Berikut adalah interpretasi data dari Tabel 1.2 PDRB tersebut meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022. Tercatat adanya fluktuasi dalam tren kenaikan PDRB, namun secara keseluruhan memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dalam PDRB Kabupaten Solok Selatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, PDRB kembali mengalami peningkatan, dengan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.221.146,88. Ini menunjukkan bahwa secara

keseluruhan, Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut, walaupun terdapat fluktuasi tahunan yang mungkin ada pengaruh dari berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi.

Pemerintah sudah berupaya dalam melakukan usaha agar mengurangi tingkat kemiskinan melalui penerapan bantuan dan program kemiskinan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Program-program bantuan sosial untuk rakyat seperti program Indonesia Pintar (PIP) yang mana memberikan bantuan tunai pendidikan anak, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan, Bantuan Sosial Beras, serta Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bentuk inisiatif yang sedang dijalankan PKH adalah bentuk bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu dengan syarat dapat meningkatkan kemampuan SDM, terutama di aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini yang diambil Kementerian Sosial RI, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018).

Program Keluarga Harapan berbeda dari program sosial lainnya PKH secara khusus berorientasi memberikan bantuan langsung untuk keluarga dalam keadaan miskin dan rentan. Program ini memberikan tunjangan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kondisi pendidikan dan kesehatan untuk memberikan perbaikan yang lebih signifikan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada target penerima manfaat yang dituju dan tujuan jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga yang mengalami kondisi kurang mampu. Keunggulan PKH mencakup aspek program berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, seleksi ketat terhadap keluarga penerima manfaat (KPM), upaya peningkatan pendidikan, pemeringkatan beban ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan keluarga penerima manfaat, dukungan konkret untuk penyandang disabilitas dan lansia, serta penciptaan peluang kerja baru bagi keluarga penerima manfaat dan pendamping mereka (Kemensos, 2019).

**Tabel 1.3 Jumlah Anggaran PKH di kabupaten Solok Selatan
Tahun 2017-2022**

Tahun	PKH (Miliaran Rupiah)	Jlm penerima KPM (orang/Jiwa)
2017	3.176.000.000,-	6.573
2018	2.999.500.000,-	5.999
2019	8.757.100.000,-	11.323
2020	23.174.288.000,-	49.807
2021	15.760.850.000,-	20.739
2022	19.013.600.000,-	24.243

(sumber : BPS Provinsi Sumbar, 2023)

Terlihat pada tabel 1.3 Anggaran PKH dari tahun 2017 hingga 2022. Terjadi lonjakan terbesar pada tahun 2019 sampai 2020. Dan terdapat penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebelum kembali naik pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2021 disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang berubah dari pemerintah. Begitu juga penerima PKH mengalami kenaikan dan penurunan terhadap penerima PKH, yang paling banyak menerima tahun 2020 mencapai 49.807 jiwa/orang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan kawan-kawan, terdapat keterkaitan antara PKH dengan kemiskinan. Bila Program Keluarga Harapan (PKH) terus dijalankan, maka penurunan kemiskinan akan meningkat. Hal tersebut tujuan jangka panjang PKH yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Rohmi et al.,(2021), waluyo & Khoirunurrofik (2021), Fitri et al., (2018), Sahib (2021), Marwida et al., (2021), telah mengkaji pengaruh PKH terhadap Kemiskinan dan menemukan bahwa program berdampak positif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Peneliti menambahkan dua variabel yang dianggap menjadi faktor yang memiliki dampak terhadap kemiskinan, yaitu pengangguran dan PDRB. Penambahan variabel pengangguran dan PDRB ini karena tingkat pengangguran dan PDRB sebagai indikator penting untuk ukuran kesejahteraan ekonomi pada daerah. Pengangguran menunjukkan seberapa banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan potensi pendapatan, sementara PDRB mencerminkan produksi ekonomi bruto suatu wilayah. Hubungan antara kedua variabel ini dengan tingkat kemiskinan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi ekonomi

yang mendasari kemiskinan. Dalam penelitian Silastri (2021), dijelaskan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian selanjutnya oleh Leonita et al., (2019) menyatakan bahwa PDRB dan pengangguran secara signifikan mempengaruhi kemiskinan dan penelitian Harahap (2020) menyatakan hasil penelitian ini diketahui pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Dari penjelasan di atas tujuan penelitian ini untuk membahas dan mengkaji bagaimana pengaruh PKH, pengangguran dan PDRB di Kabupaten Solok Selatan terhadap kemiskinan dengan menuliskan dalam sebuah penelitian di Kabupaten Solok Selatan yang akan berjudul **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Solok Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Pengangguran dan PDRB Terhadap kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk gelar sarjana dalam program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian bisa memberikan kontribusi sebagai suatu karya ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberikan keuntungan dengan memperluas pemahaman untuk menyusun skripsi. Bisa berfungsi sebagai bahan pembandingan atau dukungan dalam penelitian berikutnya.

1.5 .Ruang Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis akan membatasi variabel yang akan diuji sebagai faktor, dimana pengaruh PKH, Pengangguran serta PDRB terhadap kemiskinan di kabupaten solok selatan, yaitu variabel PKH, Pengangguran, dan PDRB. Ruang lingkup yaitu adalah Kabupaten Solok Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penataan penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pengantar menjelaskan konteks masalah, merumuskan permasalahan, menetapkan tujuan penelitian, menyajikan manfaat penelitian, menguraikan cakupan penelitian, dan merinci struktur penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, akan diuraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, tinjauan pustaka mengenai studi-studi terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengupas lokasi dan periode penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data dan alat analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menerapkan temuan dan hasil pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai rangkuman kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka serta lampiran.